

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan alam yang indah dan kaya, tentu dapat dimanfaatkan dalam kehidupan untuk berbagai sektor. Kekayaan flora, fauna dan budaya dengan berbagai keunikan yang dimiliki, menjadi potensi yang sangat besar dan memberikan daya tarik tersendiri, terlebih pada kepariwisataan di Indonesia. Pariwisata menjadi salah satu sektor yang dapat menopang sektor yang lain. Sektor pariwisata ini mampu memajukan dan mengoptimalkan pembangunan, menciptakan berbagai bentuk usaha baru, serta menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Disamping itu, pariwisata juga menjadi salah satu sumber penerimaan resmi negara, sehingga pemerintah harus terus berupaya untuk mengembangkan dan mengelola kepariwisataan Indonesia dengan baik.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menegaskan bahwa pariwisata merupakan beragam kegiatan wisata yang didorong oleh bermacam-macam sarana prasarana dan juga penyediaan layanan oleh masyarakat, pengusaha, serta pemerintah. Menurut Wahab (dalam Syahputra & Ma'ruf, 2020) pariwisata adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh manusia dengan sadar dan memperoleh suatu bentuk pelayanan secara bergiliran diantara para orang di dalam atau di luar sebuah negara, dan mampu memberikan kecepatan pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup, serta menghidupkan bidang produksi yang lainnya pada negara penerima.

Pengelolaan pariwisata merupakan upaya pemanfaatan hingga pendayagunaan potensi pariwisata yang berorientasi terhadap kepentingan pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan pariwisata perlu dilakukan untuk menyetarakan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi melalui pemberian layanan terhadap semua wisatawan, serta melindungi lingkungan dan melestarikan keanekaragaman budaya. Suatu daerah atau negara dapat menarik dan mendatangkan wisatawan dalam jumlah besar apabila pengelolaan dan pengembangan pariwisata dilakukan dengan baik, sehingga dapat memberikan keuntungan bagi daerah serta masyarakat di sekitar. Perlu adanya formulasi dengan melibatkan semua pihak termasuk pihak-pihak diluar sektor pemerintahan agar pengelolaan dan pengembangan pariwisata mampu terlaksana secara optimal dan efektif.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berdasar asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi, memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan terhadap wilayahnya. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai wewenang dan pilihan dalam melakukan pengelolaan dan pengaturan kepariwisataan yang terdapat di daerahnya. Berpedoman pada kebijakan yang telah ditetapkan, pemerintah daerah dapat memanfaatkan dan mengelola potensi yang dimiliki pada setiap daerah masing-masing guna mendorong pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga potensi yang ada.

Pariwisata bersifat kompleks, untuk memberikan manfaat yang maksimal bagi semua pihak, pengelolaan dan pengembangannya diperlukan daya dukung yang optimal, tidak hanya daya dukung lingkungan, namun juga daya dukung yang berkorelasi dengan modal, aksesibilitas, serta sarana prasarana. Perlu adanya kerjasama dan kolaborasi dengan beberapa pemangku kepentingan, meliputi pemerintah, swasta, dan masyarakat. Hal ini sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menyatakan kepariwisataan diselenggarakan salah satunya berprinsip “menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan”. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, juga menegaskan pelaksanaan pengembangan destinasi pariwisata yang sesuai dengan standar destinasi pariwisata berkelanjutan membutuhkan keterlibatan dari berbagai pemangku kepentingan yaitu pemerintah, sektor publik, dan swasta untuk mencapai tujuan.

Kabupaten Wonosobo sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki potensi wisata cukup besar dan termasuk destinasi wisata unggulan, juga termasuk kabupaten yang banyak dikunjungi wisatawan. Kabupaten Wonosobo memiliki keunikan dan kharisma tersendiri terutama di sektor pariwisata. Banyaknya potensi wisata yang dimiliki, sudah menjadi keharusan bagi Kabupaten Wonosobo untuk mengelola dan mengembangkan potensi tersebut dengan baik agar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat sesuai Peraturan

Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Wonosobo Tahun 2017-2032.

Telaga Menjer adalah salah satu destinasi wisata alam yang terletak kurang lebih 12 kilometer dari Ibukota Kabupaten Wonosobo tepatnya di Desa Maron, Kecamatan Garung. Telaga Menjer terbentuk secara alami oleh alam, diakibatkan adanya letusan gunung berapi di kaki Gunung Pakuwaja. Telaga tersebut dinamakan Telaga Menjer karena pada awalnya wilayah tersebut merupakan Desa Menjer yang kemudian mengalami pemekaran menjadi Desa Maron dan Desa Menjer. Telaga Menjer terletak pada ketinggian 1.300 mdpl dengan suhu yang cukup sejuk antara 22-27°C. Luas Telaga Menjer kurang lebih 70 hektare dan kedalaman sekitar 45 meter. Dengan keindahan alam yang dimiliki, Telaga Menjer memiliki magnet wisata khusus bagi masyarakat untuk datang dan mengunjungi Telaga tersebut.

Telaga Menjer tidak hanya sebagai objek wisata, masyarakat sekitar juga memanfaatkan Telaga Menjer untuk membudidayakan ikan air tawar dengan membuat keramba di tepian telaga, dan wisatawan juga dapat memancing ikan pada keramba tersebut. Keramba-keramba inilah juga menjadi salah satu ketertarikan khusus bagi wisatawan yang datang ke Telaga Menjer. Telaga Menjer juga dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik sejak jaman penjajahan Belanda sampai sekarang dengan dibangun sebuah pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang berjarak kurang lebih 2 kilometer dari Telaga Menjer. Air dari Telaga Menjer dialirkan sampai dengan PLTA dengan dilakukan pembendungan sebagian kecil air

dari telaga, dan dialirkan melalui pipa berdiameter sekitar 3 meter yang dipasang dibawahnya menuju PLTA.

Telaga Menjer sebagai salah satu wisata air di Kabupaten Wonosobo, tidak pernah sepi pengunjung setiap tahunnya. Berikut ini tabel mengenai jumlah kunjungan wisatawan beserta pendapatan yang diperoleh pada objek wisata di Kabupaten Wonosobo termasuk Telaga Menjer dari tahun 2017-2019.

Tabel 1. 1
Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Pendapatan pada Objek Wisata di Kabupaten Wonosobo Tahun 2017-2019

No	Objek Wisata	Wisnu			Wisman			Pendapatan
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	
1.	Kawasan DT Dieng	275.915	312.209	463.199	-	1.074	592	4.164.810.200 (30,6%)
2.	Lembah Dieng	275.915	312.209	463.199	-	1.074	592	1.951.815.400 (14,3%)
3.	Telaga Menjer	26.300	18.794	27.635	-	-	-	230.936.200 (1,7%)
4.	Kalianget	149.095	94.225	157.870	-	-	-	2.403.418.000 (17,7%)
5.	GR Mangli	65.567	53.186	101.555	-	-	-	647.613.200 (4,8%)
6.	Waduk Wadaslintang	30.725	27.029	32.177	-	-	-	224.151.900 (1,6%)
7.	DPT	275.915	312.209	422.896	-	1.704	425	3.991.729.400 (29,3%)
	Jumlah	1.099.432	1.129.861	1.668.531	-	3.222	1.609	13.614.474.300

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo, 2017-2019 (Diolah Peneliti)

Tabel diatas menunjukkan dari tahun 2017-2019, beberapa objek wisata di Wonosobo mengalami jumlah peningkatan pengunjung dan pendapatan setiap tahunnya, namun pada sebagian objek wisata yang lain mengalami jumlah

peningkatan dan penurunan yang tidak stabil setiap tahun dari tahun 2017-2019, salah satunya Telaga Menjer. Dibandingkan dengan Waduk Wadaslintang yang terletak diantara Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Kebumen, dengan persamaan kedua objek wisata tersebut yaitu wisata air, jumlah kunjungan Telaga Menjer lebih sedikit daripada jumlah kunjungan di Waduk Wadaslintang yang mencapai 30.000 bahkan lebih pengunjung setiap tahunnya. Bahkan pendapatan dari objek wisata Telaga Menjer belum bisa berkontribusi banyak bagi PAD Kabupaten Wonosobo setiap tahunnya. Tahun 2017 sampai dengan 2019, Telaga Menjer hanya berkontribusi 1,7% yakni sebesar Rp 230.936.200 dari total pendapatan objek wisata di Kabupaten Wonosobo sebesar Rp 13.614.474.300.

Telaga Menjer apabila dibandingkan dengan objek wisata yang lain yang terdapat di Kabupaten Wonosobo, menjadi salah satu objek wisata yang kurang diminati oleh wisatawan terlebih wisatawan mancanegara. Tabel diatas menunjukkan tahun 2017 sampai 2019, Telaga Menjer sama sekali tidak dikunjungi wisatawan mancanegara. Hanya beberapa objek wisata yang dikunjungi wisatawan mancanegara di tahun 2018-2019, sehingga pengelolaan dan pengembangan yang maksimal dan peningkatan promosi pariwisata perlu dilakukan agar mampu memberikan kontribusi kepada PAD Kabupaten Wonosobo sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Wonosobo Tahun 2017-2021.

Pelaksanaan pengelolaan objek wisata Telaga Menjer tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Semua *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan

Telaga Menjer turut memiliki tanggung jawab dalam objek wisata tersebut. Kenyataannya, *stakeholder* yang terlibat belum sepenuhnya mengelola dan bertanggung jawab dengan baik, masih ditemui rendahnya tanggung jawab masyarakat dalam melakukan pengelolaan telaga tersebut.

Pemerintah daerah sudah memberikan beberapa fasilitas umum dan fasilitas pendukung untuk objek wisata Telaga Menjer, salah satunya menyediakan perahu *boat* untuk membantu wisatawan mengelilingi telaga. Namun masyarakat setempat juga turut membuat perahu dari kayu dan bambu yang disebut dengan “*gethek*” atau perahu motor kecil untuk membantu mengantarkan wisatawan mengelilingi telaga juga. Walaupun *gethek* ini sudah diberikan izin untuk beroperasi, masyarakat yang turut mengelola *gethek* masih kurang memperhatikan keselamatan wisatawan. Masyarakat yang bersangkutan tidak mengganti atau memperbaiki *gethek* jika terdapat kerusakan, mereka hanya menambal bagian yang rusak, sehingga masih cukup rentan terhadap keselamatan wisatawan.

Antar *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan Telaga Menjer belum menjalin kerjasama dengan baik, dapat dilihat masih ditemukan konflik kepentingan diantara *stakeholder* terkait. Salah satu contohnya antara Pemdes Maron dan Bumdes Sumber Lancar dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo. Dalam melakukan pembangunan di Telaga Menjer, pihak tersebut belum bersinergi dan berintegrasi untuk satu wilayah yaitu Telaga Menjer. Namun mereka masih mengenal pembagian wilayah dalam melakukan pengelolaan tersebut. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo mengelola Telaga Menjer bagian barat, sedangkan Pemdes Maron dan Bumdes Sumber Lancar

mengelola Telaga Menjer sebelah timur. Begitu juga antara masyarakat setempat dengan Pemdes Maron juga belum sepaham terkait pengelolaan objek wisata Telaga Menjer. Hal ini juga berpengaruh dan menjadi penyebab rendahnya kontribusi pendapatan dari objek wisata Telaga Menjer bagi PAD Kabupaten Wonosobo.

Desa Maron memiliki beberapa komunitas yang turut berupaya dalam mengelola pariwisata, tetapi dalam pelaksanaannya belum semua komunitas tersebut memperoleh peran yang sama pada pengelolaan pariwisata tersebut. Salah satunya Pokdarwis Desa Maron tidak berpartisipasi dalam pengelolaan objek wisata Telaga Menjer, karena pengelolaan pada objek wisata tersebut mayoritas dilakukan oleh Karang Taruna Desa Maron dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo (Afni, 2021).

Penelitian ini berfokus pada peran *stakeholder* dan *stakeholders mapping* terhadap seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan objek wisata Telaga Menjer Desa Maron Kabupaten Wonosobo. Secara lebih spesifik, penulis akan menguraikan peran dan mengidentifikasi hal-hal yang menyebabkan timbulnya ketidakmerataan peran para pemangku kepentingan yang terlibat, serta melakukan analisis *stakeholders mapping* dengan mengambil kasus semua *stakeholders* yang terlibat dalam melakukan pengelolaan pada objek wisata Telaga Menjer.

Pengelolaan Telaga Menjer tentu menjadi tanggung jawab bersama, termasuk seluruh *stakeholder* yang terlibat, tak terkecuali pemerintah. Peran para *stakeholder* tersebut perlu menjadi perhatian berkaitan dengan permasalahan yang

terjadi, dalam hal ini dapat dikatakan setiap *stakeholder* pasti memiliki tanggung jawab dan peran yang berbeda-beda dalam mengelola Telaga Menjer. Maka muncul pertanyaan “Bagaimana pemetaan *stakeholder* dalam pengelolaan wisata Telaga Menjer Desa Maron Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pemetaan *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan objek wisata Telaga Menjer Desa Maron Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo?
2. Bagaimana peran masing-masing *stakeholder* dalam pengelolaan objek wisata Telaga Menjer Desa Maron Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan yaitu :

1. Mengidentifikasi *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan objek wisata Telaga Menjer Desa Maron.
2. Menganalisis peran, kewenangan, dan kepentingan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan objek wisata Telaga Menjer Desa Maron.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, wawasan dan kepustakaan dibidang administrasi publik yang berkaitan dengan bidang pemerintahan yaitu *stakeholders mapping* yang ada di Indonesia,

khususnya terkait pengelolaan yang dilakukan. Penelitian ini juga dapat digunakan untuk rujukan penelitian lain terkait *stakeholders mapping*.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi bagi *stakeholders* dan instansi terkait, khususnya dalam pengelolaan objek wisata.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dikaji difokuskan pada penelitian yang berkaitan dengan penelitian tentang pemetaan *stakeholder* (*stakeholders mapping*).

Hidayah,dkk dalam artikelnya membahas mengenai peran *stakeholder* dalam pengembangan wisata Talang Air peninggalan kolonial Belanda di Kelurahan Pajaresuk Kabupaten Pringsewu. Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, studi dokumen, dan diskusi kelompok terarah. Studi ini menemukan bahwa terdapat keterlibatan beberapa *stakeholders* dalam pengembangan pariwisata Talang Air yang meliputi masyarakat, pemerintah, dan swasta. Keterlibatan *stakeholders* dalam pengembangan wisata tersebut melaksanakan beberapa pengembangan secara fisik maupun non-fisik. Keterjalinan kerjasama dan komunikasi antar *stakeholders* juga baik, sehingga mendorong proses pelaksanaan pengembangan pariwisata Talang Air dengan cepat (A.Hidayah et al., 2019).

Steven L. Bernstein, dkk dalam artikelnya membahas mengenai pemetaan dukungan kontekstual dan organisasional dari pemangku kepentingan. Metode kualitatif dilakukan oleh Bernstein dkk dengan model COSMOS untuk memvisualisasikan pemangku kepentingan yang terlibat dalam studi berbasis rumah sakit yang dilakukan dari tahun 2013-2016. Studi ini menemukan bahwa COSMOS terdiri dari bagan organisasi yang mengidentifikasi semua pemangku kepentingan utama, dengan manipulasi warna dan batas kotak komponen untuk menunjukkan dukungan pemangku kepentingan untuk proyek implementasi, dan tingkat kekritisannya untuk keberhasilannya. Visualisasi COSMOS menginformasikan pekerjaan tim selanjutnya dengan mengidentifikasi hambatan potensial yang mungkin memerlukan perhatian tambahan untuk mengumpulkan dan mempertahankan dukungan selama proyek berlangsung (Bernstein et al., 2020).

Penelitian lain yang ditulis oleh Aulia Buana dan Jawoto Sih Setyono mengenai analisis peran *stakeholder* dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Gampong Dayah pada penyusunan dokumen perencanaan dalam pembangunan Gampong Dayah yaitu RPJMG. Analisis pengelompokan pemangku kepentingan menggunakan metode kuantitatif, yaitu matriks pengaruh (*influence*) dan kepentingan (*interest*), dengan menggunakan kuesioner terdiri dari 15 responden dengan *purposive sampling*. Hasil studi menemukan pemetaan dalam matriks pengaruh dan kepentingan, *stakeholders* yang terlibat dalam proses penyusunan RPJM Desa Gampong Dayah di Kecamatan Batee, di kelompokkan menjadi *key player* terdiri dari Keuchik, Sekdes, TPG, Pendamping Desa dan Kecamatan; *context setter* terdiri dari DPMG; subject terdiri dari Kaur Umum, Kaur

Pemerintahan, Kaur Pembangunan, dan unsur masyarakat, serta *crowd* terdiri dari TA, Ketua PKK, Tokoh Agama, dan Bappeda (Buana & Setyono, 2022).

Tamayo,dkk dalam artikelnya membahas mengenai pemetaan pemangku kepentingan dan promosi tujuan pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan setempat. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan studi kasus dan dilakukan investigasi dalam dua tahap yaitu menganalisis teks pertemuan dewan, dan elaborasi peta jaringan dengan perangkat lunak UCINET dan NETDRAW. Hasil studi menunjukkan bahwa pemangku kepentingan dengan tingkat sentralitas yang lebih tinggi terkait langsung dengan SDG 11 mendorong Kota Berkelanjutan; dan sektor publik mendominasi proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan daerah. Hasil ini membantu menjelaskan struktur jaringan dan peran pemangku kepentingan, menyoroti bahwa pelaksanaan tata kelola dan tata kelola yang demokratis masih langka dan jauh dari mencapai praktik heterogen dalam proses pengambilan keputusan (Catzín-Tamayo et al., 2022).

Penelitian lain yang ditulis oleh Riska Destiana,dkk mengenai peran *stakeholders*, hubungan antar *stakeholders*, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pengembangan destinasi pariwisata halal di Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau. Metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data mengintegrasikan wawancara secara daring, dokumentasi, dan observasi dilakukan dalam penelitian ini. Studi ini menemukan terdapat 38 *stakeholder* yang terlibat dalam pelaksanaan pengembangan destinasi pariwisata tersebut dengan konsep pentahelix, meliputi pemerintah, bisnis, akademisi, komunitas, dan media massa; kemudian dikelompokkan menjadi *stakeholder*

primer, kunci dan sekunder. *Stakeholders* tersebut berperan sebagai *policy creator*, koordinator, fasilitator, implementor dan akselerator. Keterjalinan hubungan diantara *stakeholders* dapat diketahui dari bentuk serta aktivitasnya. Adapun faktor pendukung yaitu nilai dan komunikasi, serta faktor penghambat yaitu kepercayaan dan kebijakan dalam pengembangan destinasi pariwisata halal (Destiana et al., 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Arnia Dian Kusuma Dewi,dkk juga sejalan dengan penelitian tersebut, yaitu melakukan pemetaan *stakeholder* dalam Program Pencegahan Fraud Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Kota Semarang, menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam dengan *purposive sampling* dan teori *stakeholder* mapping digunakan untuk analisis. Variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu pengaruh, keterlibatan, dan sikap. Hasil penelitian menunjukkan pada variabel pengaruh, kelompok provider menjadi kelompok berpengaruh paling sedikit dalam program tersebut. Variabel keterlibatan menunjukkan diantara *stakeholder* yang lain, *stakeholder* yang paling kurang terlibat yaitu *stakeholder* provider. Variabel sikap menunjukkan adanya dukungan dari semua kelompok *stakeholder* untuk terselenggaranya program tersebut. Upaya paling sedikit yang menjadi campur tangan dalam program JKN ini yaitu upaya pendeteksian, terdapat 3 *stakeholder* yang sangat berpengaruh dibandingkan 12 *stakeholder* yang lain (Dewi et al., 2020).

Fitri Handayani dan Hardi Warsono dalam artikelnya membahas peran *stakeholder* dan faktor penghambat dalam pengembangan objek wisata Pantai Karang Jahe di Kabupaten Rembang. Metode yang digunakan yaitu metode

deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Sementara pengumpulan data sekunder melalui buku, internet, dan dokumen atau arsip. Hasil penelitian menunjukkan terdapat keterlibatan Dinbudparpora, masyarakat sekitar, dan pengusaha dalam pengembangan wisata pantai Karang Jahe, dengan peran setiap *stakeholders* meliputi *policy creator*, koordinator, fasilitator, pelaksana, dan akselerator. Faktor penghambat peran *stakeholders* dalam pengembangan wisata tersebut diantaranya keterbatasan lahan, anggaran, dan SDM; pola pikir, regulasi, kegiatan promosi, dan kerjasama antar *stakeholders* (Handayani & Warsono, 2017).

Penelitian lain yang ditulis oleh Nurhuda Candra Hidayat,dkk melakukan analisis *stakeholder* dalam pengelolaan sumber daya hutan Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif menggunakan *purposive sampling*. Hasil penelitian ini mengidentifikasi *stakeholder* primer yaitu LMDH Wana Makmur dan Pemerintah Desa Tugusari; *stakeholder* sekunder yaitu UPT PHW VII Bondowoso wilayah kerja Jember; dan *stakeholder* kunci adalah Perum Perhutani KPH Jember. Kategori *key player* meliputi Perum Perhutani KPH Jember. *Context setters* meliputi Pemerintah Desa. *Subjects* yaitu LMDH Wana Makmur dan *Crowd* yaitu UPT PHW VII Bondowoso wilayah kerja Jember. Seringnya rapat koordinasi dan kerja sama antara LMDH Wana Makmur dan Perum Perhutani KPH Jember, membuat hubungan antar *stakeholders* tersebut berjalan sangat baik. (Hidayat et al., 2020).

Eric C.W. Lou,dkk dalam artikelnya membahas mengenai praktik keterlibatan pemangku kepentingan dalam warisan yang dibangun, sehingga

organisasi dapat mengelola pemangku kepentingan mereka dengan memenuhi tujuan strategis. Penelitian ini menggunakan pendekatan pemetaan preferensi pemangku kepentingan, dengan teknik analisis keputusan multi-atribut digunakan untuk menunjukkan bagaimana identifikasi dan analisis pemangku kepentingan. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi 8 Virtual *Stakeholder* Group (VSG) yang terdiri dari Ekstrimis, Pakar, Ekonomi, Sosial, Tata Kelola, dan Turis; serta skala pengaruh kepentingan kekuasaan mereka pada berbagai tahap proses pengelolaan warisan. Temuan penelitian ini juga mengungkapkan berbagai tingkat keterlibatan dari masing-masing kelompok pemangku kepentingan yang berbeda di setiap tahapan kerja dengan tahap 5 (konstruksi) menjadi yang paling sedikit terlibat (Lou et al., 2021).

Penelitian oleh Riesti Triyanti dan Indah Susilowati melakukan analisis terkait peran, kepentingan, dan pengaruh *stakeholders* dalam pengelolaan kawasan pesisir Gunungkidul, serta pembuatan strategi untuk mengelola kawasan pesisir berkelanjutan. Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif dan kualitatif dengan wawancara mendalam dan kuesioner. Penelitian yang dilakukan memperoleh hasil bahwa terdapat keterlibatan tiga *stakeholders* kunci, enam *stakeholders* utama, dan tiga *stakeholders* pendukung dalam pengelolaan wilayah pesisir tersebut, yang berperan sebagai koordinator, implementor, dan fasilitator. Pemetaan pemangku kepentingan memperlihatkan kelompok *stakeholders* yang terlibat dalam pengelolaan tersebut sebagai subjek, pemain, aktor, dan penonton. Diperlukan kerja sama yang meningkat dan kolaborasi yang maksimal antar

stakeholder sebagai strategi untuk mengelola kawasan pesisir secara berkelanjutan (Triyanti & Susilowati, 2019).

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada kajian yang dititik-beratkan pada mengeksplorasi *stakeholders* yang terlibat, peran, kepentingan, dan pengaruh *stakeholders* yang terlibat dalam pengelolaan objek wisata Telaga Menjer.

Tabel 1. 2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti - Tahun	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Hidayah,dkk (2019)	Mengetahui siapa saja <i>stakeholder</i> yang terlibat dan peranan <i>stakeholder</i> dalam mengembangkan Wisata Talang Air di Kelurahan Pajaresuk Kabupaten Pringsewu.	Konsep klasifikasi <i>stakeholder</i> yang dikemukakan oleh Townsley.	Deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	<i>Stakeholder</i> yang terlibat dalam pengembangan pariwisata Talang Air yang terdiri dari masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta;
2.	Steven L. Berstein, dkk (2020)	Mengidentifikasi dan menilai pemangku kepentingan utama dalam proyek implementasi	Model COSMOS (<i>Contextual and Organizational Support Mapping of Stakeholders</i>)	Kualitatif dengan model COSMOS, dilakukan wawancara kualitatif.	COSMOS terdiri dari bagan organisasi yang mengidentifikasi semua pemangku kepentingan utama. Visualisasi COSMOS menginformasikan pekerjaan tim selanjutnya

No	Nama Peneliti - Tahun	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
					dengan mengidentifikasi hambatan potensial.
3.	Aulia Buana dan Jawoto Sih Setyono (2022)	Mengkaji peran <i>stakeholder</i> yang terlibat dalam proses penyusunan RPJM Desa Gampong Dayah di Kecamatan Batee.	Konsep kategori dan klasifikasi <i>stakeholders</i> sebagaimana dikemukakan oleh Reed et al (2009)	Metode kuantitatif yaitu matriks pengaruh dan kepentingan.	Pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses penyusunan RPJM Desa Gampong Dayah meliputi key player, context setter, subject, serta crowd.
4.	Tamayo,dkk (2022)	Mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat dalam pengambilan keputusan.	<i>Stakeholder Theory (ST)</i> yang dikemukakan oleh Freeman (1984) dan <i>Social Network Analysis (SNA)</i> .	Kualitatif dengan studi kasus.	<i>Stakeholder</i> dengan tingkat sentralitas yang lebih tinggi berkaitan langsung dengan SDG 11 mendorong Kota Berkelanjutan; dan sektor publik mendominasi proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan daerah.
5.	Riska Destiana,dkk (2020)	Mengidentifikasi <i>stakeholders</i> yang terlibat, menganalisis peran <i>stakeholders</i> , hubungan antar	Konsep pentahelix; kategori <i>stakeholders</i> ; serta peran <i>stakeholders</i> .	Deskriptif kualitatif.	Pengembangan destinasi pariwisata halal Pulau Penyengat terdapat 38 <i>stakeholder</i> yang terlibat

No	Nama Peneliti - Tahun	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		<i>stakeholders</i> , faktor pendukung dan penghambat.			dengan konsep pentahelix, yang dikelompokkan menjadi <i>stakeholders</i> primer, kunci dan sekunder.
6.	Arnia Dian Kusuma Dewi, dkk (2020)	Memahami peran dan keterlibatan <i>stakeholder</i> dalam Program Pencegahan Fraud JKN di Puskesmas Kota Semarang.	Teori analisis <i>stakeholder</i> yang dikemukakan oleh Lucidus Consulting Ltd dan model Vos and Achterkamp.	Kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	Upaya yang paling sedikit menjadi intervensi dalam program yaitu upaya pendeteksian, dan dari 12 <i>stakeholder</i> , hanya 3 <i>stakeholder</i> yang berpengaruh secara signifikan.
7.	Fitri Handayani dan Hardi Warsono (2017)	Mengidentifikasi dan menganalisis <i>stakeholders</i> dengan memetakan <i>stakeholders</i> .	Teori <i>stakeholders</i> , peran <i>stakeholders</i> yang dikemukakan oleh Nugroho (2014), dan kemitraan yang dikemukakan oleh Sulistiyani (2004).	Deskriptif kualitatif.	Pengembangan wisata pantai Karang Jahe melibatkan peran Dinbudparpora, masyarakat sekitar, dan pengusaha; dengan peran masing-masing pemangku kepentingan tersebut terdiri dari pembuat kebijakan, koordinator, fasilitator, pelaksana dan akselerator.

No	Nama Peneliti - Tahun	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
8.	Nurhuda Candra Hidayat,dkk (2020)	Menganalisis <i>stakeholder</i> dalam pengelolaan sumber daya hutan Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.	Teori Overseas Development Administration dan teori Reed untuk pengkategorian dan interelasi <i>stakeholder</i> .	Kualitatif deskriptif.	<i>Stakeholder</i> dalam pengelolaan sumber daya hutan Desa Tugusari meliputi <i>stakeholder</i> primer, <i>stakeholder</i> sekunder, dan <i>stakeholder</i> kunci
9.	Eric C.W. Lou,dkk (2021)	Memberikan kejelasan yang lebih besar pada praktik keterlibatan pemangku kepentingan dalam warisan yang dibangun.	Power-interest grid yang dikemukakan oleh Reason (1997).	Pendekatan pemetaan preferensi pemangku kepentingan, dengan teknik analisis keputusan multi-atribut.	Terdapat 8 Virtual <i>Stakeholder</i> Group (VSG) dengan berbagai tingkat keterlibatan dari setiap kelompok <i>stakeholders</i> yang berbeda.
10.	Riesti Triyanti dan Indah Susilowati (2019)	Menganalisis peran, kepentingan, dan pengaruh <i>stakeholders</i> dalam pengelolaan kawasan pesisir Gunungkidul.	Teori analisis pemangku kepentingan yang dikemukakan oleh Reed et al (2009).	Kuantitatif dan kualitatif.	Beberapa <i>stakeholders</i> terlibat dalam pengelolaan wilayah pesisir Kabupaten Gunungkidul. Diantaranya terdiri dari tiga <i>stakeholders</i> kunci, enam <i>stakeholders</i> utama, dan tiga <i>stakeholders</i> pendukung, sebagai koordinator,

No	Nama Peneliti - Tahun	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
					fasilitator, dan pelaksana.

1.5.2 Kerangka Teori

1.5.2.1 Paradigma Administrasi Publik

Menurut Nicholas Henry, bahwa terdapat paradigma dalam administrasi negara, diuraikan sebagai berikut :

1. **Paradigma 1 (1900-1926)**, dikenal sebagai paradigma dikotomi politik dan administrasi. Beberapa tokoh dari paradigma 1 yaitu Frank J. Goodnow dan Leonard D. White. Beberapa tokoh dari paradigma 1 yaitu Frank J. Goodnow dan Leonard D. White. Pemisahan antara politik dan administrasi diwujudkan dalam pemisahan antara badan legislatif yang bertugas mengekspresi kehendak rakyat, dengan badan eksekutif yang bertugas mengimplementasikan kehendak tersebut. Badan yudikatif dalam hal ini memiliki fungsi untuk menyokong badan legislatif dalam menetapkan tujuan dan merumuskan kebijakan. Keterkaitan dari paradigma tersebut yaitu administrasi harus dilihat sebagai suatu hal yang bebas nilai, dan ditujukan untuk mencapai nilai efisiensi dan ekonomi dari *government bureaucracy*. Paradigma ini lebih mementingkan aspek locus yaitu *government bureucracy*, sedangkan fokus yang perlu dimajukan dalam administrasi publik kurang dibahas secara jelas dan detail.
2. **Paradigma 2 (1927-1937)**, disebut sebagai paradigma prinsip-prinsip administrasi. Beberapa tokoh terkenal dari paradigma ini adalah Willoughby,

Gulick & Urwick, yang sangat dipengaruhi oleh tokoh-tokoh manajemen klasik seperti Fayol dan Taylor. Mereka mengenalkan beberapa prinsip administrasi sebagai focus administrasi publik. Prinsip-prinsip tersebut dimasukkan dalam sesuatu yang disebut sebagai POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting dan Budgeting*) yang menurutnya memiliki sifat umum sedangkan locus dari administrasi publik tidak pernah dideskripsikan dengan jelas karena mereka menganggap prinsip-prinsip tersebut bisa diterapkan dimana saja salah satunya di organisasi pemerintah. Paradigma ini, lebih menekankan focus daripada lokusnya.

3. **Paradigma 3 (1950-1970)**, adalah paradigma Administrasi Negara sebagai ilmu politik. Morstein-Marx seorang editor buku "*Elements of Public Administration*" di tahun 1946 mempertanyakan pemisahan politik dan administrasi sebagai suatu yang tidak mungkin atau tidak realistis, sedangkan Herbert Simon menunjukan kritiknya terhadap ketidak-konsistenan prinsip administrasi dan menilai bahwa prinsip-prinsip tersebut tidak berlaku secara umum, sehingga administrasi negara bukan sesuatu yang dapat berlaku dimana saja (*value free*), bahkan dipengaruhi oleh nilai-nilai tertentu. Terjadilah perlawanan antara perspektif terkait *value free administration* dengan *value laden politics*. Dalam pelaksanaannya, anggapan *value laden politics* berlaku karena secara tegas John Gaus menyatakan bahwa teori administrasi publik merupakan teori politik, sehingga memunculkan paradigma baru yang memandang administrasi publik sebagai ilmu politik dengan lokusnya

birokrasi pemerintahan, dan fokusnya menjadi tidak jelas karena banyaknya kelemahan yang terdapat dalam prinsip-prinsip administrasi publik.

4. **Paradigma 4 (1956-1970)**, adalah administrasi publik sebagai ilmu administrasi, dengan beberapa prinsip manajemen yang sebelumnya pernah terkenal dikembangkan secara ilmiah dan detail. Perilaku organisasi, analisis manajemen, penerapan teknologi modern seperti metode kuantitatif, analisis sistem, riset operasi, dan sebagainya; merupakan focus dari paradigma ini. Dalam paradigma ini, terjadi dua arah perkembangan yaitu yang berorientasi kepada perkembangan ilmu administrasi murni yang didukung oleh disiplin psikologi sosial, dan yang berorientasi pada kebijakan publik. Semua fokus yang dikembangkan disini diasumsikan dapat diterapkan tidak hanya dalam dunia bisnis tetapi juga dalam dunia administrasi publik. Karena itu, locusnya menjadi tidak jelas.
5. **Paradigma 5 (1970 - sekarang)**, disebut administrasi publik sebagai administrasi publik. Paradigma ini sudah mempunyai focus dan lokus yang jelas. Focus administrasi publik dalam paradigma ini adalah teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik, sementara locusnya adalah masalah dan kepentingan publik.
6. **Paradigma 6 (1990 – sekarang)**, sebagai paradigma terakhir yang disebut dengan *governance*. *Governance* dapat diartikan sebagai implementasi kekuasaan atau otoritas yang dilakukan oleh pemimpin politik dengan berorientasi untuk kesejahteraan warga negara, mempunyai tingkat kompleksitas yang cukup tinggi dalam proses yaitu beberapa aspek masyarakat

memegang kekuasaan, memberlakukan dan menyebarluaskan kebijakan publik yang secara langsung berpengaruh terhadap masyarakat dan lembaga, juga berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi dan sosial. *Governance* dimanfaatkan untuk mendeskripsikan dasar proses dari pemerintahan modern yang berbanding terbalik dengan pemerintahan tradisional. Paradigma ini menganggap proses politik secara lebih luas, yakni warga negara maupun kelompok masyarakat terlibat dalam pembuatan kebijakan publik. *Governance* juga perlu sektor lain terkait penyediaan layanan, sedangkan pemerintah hanya mengatur dan mengarahkan. Pada intinya, *governance* memberikan syarakt penyerahan pelayanan kepada jaringan organisasi nirlaba, perusahaan swasta maupun kepada tingkat pemerintahan lainnya. Pada dasarnya, *governance* melibatkan kemitraan dalam menjalankan fungsi pemerintahan, termasuk penduduk, organisasi masyarakat, sektor publik maupun swasta (Astuti et al., 2020 : 21)

1.5.2.2 Stakeholder

Stakeholder merupakan pihak yang mampu memberikan pengaruh atau dipengaruhi (menerima dampak) oleh keputusan yang diambil atau dapat diartikan sebagai orang, kelompok atau lembaga yang memiliki perhatian dan/atau mampu memberikan pengaruh terhadap hasil suatu kegiatan. Selain itu, *stakeholders* diartikan sekelompok manusia atau komunitas meliputi masyarakat berhubungan dan berkepentingan dengan perusahaan baik secara keseluruhan maupun sebagian.

Stakeholder dapat didefinisikan sebagai individu, kelompok atau organisasi yang berkepentingan, memiliki keterlibatan, atau memperoleh pengaruh (secara

positif maupun negatif) oleh kegiatan atau program pembangunan. Pada dasarnya terdapat keterlibatan tiga *stakeholder* yang saling berkaitan satu sama lain meliputi pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam membangun dan mengelola kepariwisataan. Masing-masing *stakeholder* mempunyai peran dan fungsi berbeda yang harus dipahami agar pengembangan wisata dapat diwujudkan dan dilaksanakan dengan baik.

Freeman (1984) mendefinisikan *stakeholder* sebagai pihak yang terpengaruh oleh kebijakan dan pihak yang dapat mempengaruhi kebijakan (“... *who is affected by the decisions and actions they take, and who has the power to influence their outcome, i.e. stakeholders*”). Dari definisi Freeman tersebut dapat dimaknai bahwa *stakeholder* adalah *who affect or are affected by a decision or action* (Lembaga Administrasi Negara, 2015 : 101).

World Health Organization (WHO) memberikan definisi *stakeholder* sebagai berikut: “*who may be directly or indirectly affected by the process or the outcome*”. Selain kedua definisi sebelumnya, menurut Eden and Ackerman (1998) dalam Bryson (2002) *stakeholder* adalah “*people or small groups with the power to respond to, negotiate with, and change the strategic future of the organization*”. Menurut Wibisono (2007), *stakeholder* didefinisikan sebagai suatu pihak atau kelompok yang berkepentingan secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi atau dipengaruhi berdasarkan kegiatan dan keberadaan perusahaan. Menurut Gonslaves, *stakeholder* berkaitan dengan siapa yang berdampak dan/atau siapa yang terdampak kebijakan program, dan aktivitas pembangunan. Baik laki-laki maupun perempuan, komunitas, kelompok sosial ekonomi, atau bahkan

lembaga dalam bermacam-macam aspek ada pada setiap jenjang kelompok masyarakat. Masing-masing kelompok ini mempunyai sumber daya dan kebutuhan yang berbeda antara satu dengan yang lain, yang harus terwakili pada proses pengambilan keputusan dalam kegiatan pembangunan (A.Hidayah et al., 2019 : 57).

Stakeholder atau pemangku kepentingan merupakan kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan untuk mencapai kesejahteraan dan keberlangsungan organisasi. *Stakeholders* meliputi seluruh pihak yang berkaitan dalam pengelolaan sumber daya. *Stakeholder* mempunyai kepentingan, kebutuhan, dan perspektif yang berbeda dan harus dikelola dengan baik agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Maryono, dkk (2005) (Handayani & Warsono, 2017 : 2) *stakeholders* dibagi menjadi 3 kelompok yaitu :

1. *Stakeholders* primer

Stakeholder primer merupakan *stakeholder* yang terdampak secara langsung baik dampak positif maupun negatif dari suatu rencana serta memiliki keterkaitan kepentingan langsung dengan kegiatan tersebut. Menjadi pihak yang memiliki kepentingan, kedudukan *stakeholder* ini harus turut menjadi pertimbangan dalam semua keputusan yang akan diambil (Hidayat et al., 2020). Pada setiap tahapan-tahapan kegiatan, *stakeholders* primer harus dilibatkan penuh karena berperan penting, serta harus dilibatkan sebagai penentu utama dalam proses pengambilan keputusan atas sebuah permasalahan.

2. *Stakeholders* kunci

Stakeholder kunci adalah mereka yang mempunyai kewenangan legal dalam aspek pengambilan keputusan atau pihak yang memiliki pengaruh kuat dan penting berkaitan kebutuhan dan perhatian terhadap kelancaran suatu kegiatan yang dilakukan. *Stakeholder* tersebut merupakan elemen eksekutif sesuai tingkatannya, legislatif, eksekutif, yudikatif, dan instansinya.

3. *Stakeholders* sekunder atau pendukung

Stakeholders pendukung adalah *stakeholder* yang tidak berkepentingan langsung terhadap suatu rencana, namun mempunyai kepedulian besar terhadap proses pengembangan. Dalam proses pengembangan suatu kegiatan *stakeholders* pendukung menjadi fasilitator dan memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan. *Stakeholders* pendukung mencakup pihak swasta, LSM, dan peneliti.

Townsley dalam Hidayah et al (2019 : 57) mengelompokkan *stakeholder* menjadi dua yang terdiri dari :

1. *Stakeholder* primer, yaitu pihak yang berkepentingan langsung berkenaan dengan sumber daya, baik sebagai mata pencaharian atau berperan langsung dalam pemanfaatan.
2. *Stakeholder* sekunder, yaitu pihak yang berminat atau berkepentingan secara tidak langsung, atau pihak yang bergantung pada kekayaan atau bisnis yang dihasilkan oleh sumber daya secara parsial.

Peran *stakeholder* dibutuhkan untuk mengetahui siapa saja yang berkepentingan atau berperan secara langsung maupun tidak langsung berkenaan dengan program yang dilakukan serta menyusun *stakeholder* menjadi sebuah hal

yang sangat penting, sehingga fungsi dan peran setiap *stakeholder* perlu dilakukan dengan maksimal.

Penelitian ini mengklasifikasikan *stakeholders* menjadi tiga, meliputi *stakeholder* primer, *stakeholder* sekunder atau pendukung, dan *stakeholder* kunci.

1.5.2.3 Stakeholders Mapping

Pergeseran paradigma administrasi publik tidak dapat dilepaskan dari paradigma *Old Public Administration* (OPA), *New Public Management* (NPM) serta *New Public Service* (NPS). Paradigma administrasi publik yang pertama dikenal dengan *Old Public Administration* (OPA) atau model administrasi publik tradisional dengan berprinsip dasar berawal dari model birokrasi Max Weber dengan proses kontrol berpusat dari atas ke bawah termasuk pada pengambilan kebijakan. Konsep OPA menyelenggarakan urusan pemerintah dengan memposisikan negara menjadi aktor utama.

Perkembangan OPA memunculkan beragam kritik antara lain adanya dominasi negara dalam pelayanan publik, sehingga muncul *New Public Management* (NPM). Model NPM berupaya mengungkap dominasi pelayanan, memperluas aktor penyedia layanan, serta pendekatan manajemen yang lebih berfokus terhadap pasar (Stoker 2006:45 dalam O'Flynn : 2007). Hal yang menjadi perhatian atas munculnya NPM yaitu apakah NPM sesuai diimplementasikan dalam pengelolaan pemerintahan terutama di negara berkembang (Lembaga Administrasi Negara, 2015 : 98).

Berbeda dengan pernyataan tersebut muncul paradigma baru yaitu *New Public Service* (NPS) yang pertama kali dikenalkan oleh Janet V. Denhardt dan Robert B. Denhardt. Inti dari pergeseran paradigma tersebut yaitu perubahan tata kelola pemerintahan *government to governance*, yaitu negara tidak lagi menjadi aktor utama dalam pemerintahan. *Governance* memposisikan aktor di luar pemerintah menjadi aktor dalam pengambilan kebijakan. Dengan kata lain, aktor utama penentu kebijakan sudah tidak lagi pemerintah, akan tetapi kebijakan ditentukan oleh konsensus dari berbagai aktor.

Stakeholders mapping adalah salah satu proses yang memiliki urgensi cukup tinggi dalam tata kelola pemerintahan yang demokratis. Menurut *Business for Social Responsibility* (BSR) 2011, *stakeholders mapping* yaitu kombinasi antara proses, penelitian, dan pembahasan yang mendeskripsikan sudut pandang berulang-ulang untuk menetapkan urutan kunci dari semua *stakeholder* yang ada. WHO (2007) mendefinisikan *stakeholders mapping* adalah sebuah teknik yang bisa dipergunakan untuk mengidentifikasi dan menilai kepentingan dari pihak-pihak kunci, kelompok, atau institusi yang dapat memberikan pengaruh terhadap keberhasilan dari sebuah kegiatan.

Pemetaan *stakeholders* diperlukan untuk menganalisis tujuan utama suatu permasalahan atau isu-isu terkait, serta untuk lebih mengetahui kegiatan identifikasi *stakeholder* diperlukan guna lebih mengetahui kegiatan identifikasi *stakeholder* yang dilakukan. Beberapa informasi yang bisa didapatkan dari hasil pemetaan *stakeholder* diantaranya :

1. Siapa saja yang akan dipengaruhi;
2. Siapa saja yang dapat mempengaruhi baik dalam proses maupun hasil dari sebuah kegiatan;
3. Pihak mana saja yang harus dilibatkan, dan
4. Kapasitas siapa yang perlu ditingkatkan untuk menjadikan mereka terlibat dalam sebuah kegiatan.

Pemetaan *stakeholders* membantu pelaksanaan penilaian lingkungan kegiatan dan dapat menentukan cara terbaik bernegosiasi dalam diskusi mengenai kegiatan. Pemetaan *stakeholder* memberikan beberapa hasil antara lain :

- a. Deskripsi mengenai kepentingan *stakeholders* yang berkaitan dengan perumusan atau implementasi kebijakan;
- b. Identifikasi adanya potensi konflik antar *stakeholder* karena terdapat perbedaan kepentingan dan dapat memberikan ancaman terhadap keberhasilan implementasi kebijakan;
- c. Membantu melakukan pemetaan struktur relasi antara *stakeholder* sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kerjasama atau koalisi;
- d. Membantu merumuskan jenis partisipasi yang diharapkan dari *stakeholder* yang berbeda.

Schmeer (1999) menyatakan terkait pentingnya melakukan pemetaan *stakeholder* karena para pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi aktor penting dalam proses pembuatan kebijakan dan mengkaji pengetahuan, kepentingan, posisi, sikap mereka terhadap kebijakan. Adanya hubungan antara pembuat kebijakan dan

stakeholder dapat mendorong suatu program atau kebijakan. Golder (2005) berpendapat bahwa pemetaan *stakeholder* dapat mengidentifikasi ketertarikan para *stakeholder* terhadap kebijakan atau program; mengetahui potensi konflik atau risiko dari kebijakan; membangun relasi dengan *stakeholder*; serta dapat meminimalisir risiko kegagalan sebuah kebijakan.

1.5.2.4 Pemetaan Pemangku Kepentingan dengan Analisis *Triple Helix*, *Quadra Helix*, dan *Penta Helix*

Setelah terdapat dua model pemetaan *stakeholders* yaitu teori *triple helix* dan teori *quadra helix*, dibentuk sebuah konsep yang disebut konsep *penta helix*. Teori *triple helix* yaitu *stakeholders* antara pemerintah (*government*), pengusaha (*business*), dan akademisi (*academician*). Sementara *quadra helix* ditambah satu *stakeholders* lain yaitu masyarakat madani (*civil society*), dan *stakeholders* pada konsep *penta helix* disempurnakan menjadi lima yaitu dengan menambah media massa (*mass media*).

Tabel 1. 3
Pemetaan *Stakeholders Triple Helix, Quadra Helix, dan Penta Helix*

<i>Triple Helix</i>	<i>Quadra Helix</i>	<i>Penta Helix</i>
Pemerintah	Pemerintah	Pemerintah (<i>Government</i>)
Bisnis	Bisnis	Dunia Usaha (<i>Business</i>)
Akademisi	Akademisi	Akademisi (<i>Academician</i>)
	Organisasi Non Pemerintah/ <i>Civil Society</i>	Organisasi Non Pemerintah (<i>NGO / Civil Society</i>)
		Media Massa (<i>Mass Media</i>)

Sumber : Astuti et al., 2020

Munculnya konsep *triple helix* melahirkan suatu konsep hubungan yang komprehensif antara ilmu pengetahuan (akademisi), sektor industri atau perdagangan (dunia usaha) dan sektor publik (pemerintah). Hubungan trilogi ini sangat jelas dan saling bergantung satu sama lain. Aktor yang bertanggung jawab untuk menciptakan pengetahuan yaitu universitas. Sementara untuk menciptakan inovasi, aktor yang bertanggung jawab yaitu bidang industri. Ketiga aktor tersebut bekerja sama dengan pendekatan *top-down* agar terbentuk inovasi yang dapat meningkatkan kondisi perekonomian suatu negara.

Inti konsep *triple helix* yaitu ilmu pengetahuan menekankan sektor publik untuk mendukung percobaan dan penelitian karena sektor bisnis tidak akan pernah mengambil risiko apabila tidak mampu meyakinkan menghasilkan laba. Demikian juga diperlukan sektor publik untuk mengembangkan kondisi atau tuntutan inovasi, terutama dalam hal komunikasi, transportasi, dan sumber daya. *Triple helix* lebih bersifat umum tetapi apabila bersangkutan dengan orang, maka pengguna harus masuk dalam daftar pemangku kepentingan. Konsep *triple helix* ini menganggap *stakeholders* mengerti yang terbaik untuk pasar.

Quadruple helix mencakup empat kelompok *stakeholders* dengan setiap *stakeholders* akan berkontribusi. *Quadruple helix* akan mendekatkan antar aktor dan membawa pembicaraan ke level terendah *stakeholders*, namun pengguna diperlakukan sebagai konsumen daripada mitra sejati untuk menciptakan inovasi bersama.

Konsep *penta helix* menjadi instrumen yang sesuai untuk bekerja dengan model kompleksitas dan ekonomi. Model *penta helix* sangat bermanfaat dalam

penyelesaian permasalahan berbagai pihak dengan *stakeholders* mewakili beberapa kepentingan pada satu lokasi. Kolaborasi *penta helix* diharapkan dapat mewujudkan sebuah kebijakan yang didukung oleh keberagaman sumber daya dan sinergitas interaksi. *Penta helix* terdiri dari pemerintah, dunia usaha, universitas, organisasi non pemerintah-masyarakat madani, dan media massa.

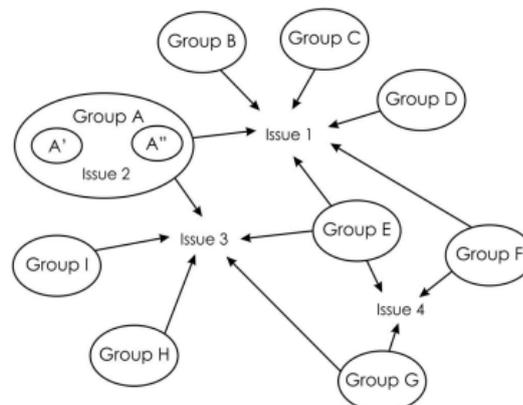
1.5.2.5 Teknik *Stakeholders Mapping*

Dalam melakukan analisis *stakeholders mapping*, terdapat beberapa instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan analisis, diantaranya :

1. *Stakeholder Issue Interrelationship Diagrams*

Merupakan teknik yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis hubungan *stakeholder* dengan berbagai isu kebijakan dan hubungan satu *stakeholder* dengan *stakeholder* lainnya. Dengan menggunakan teknik ini, maka dapat diketahui bagaimana potensi kerjasama dan konflik antar *stakeholder* yang mungkin terjadi (European Commission, 2012 : 15).

Gambar 1. 1
Stakeholder Issue Interrelationship Diagrams



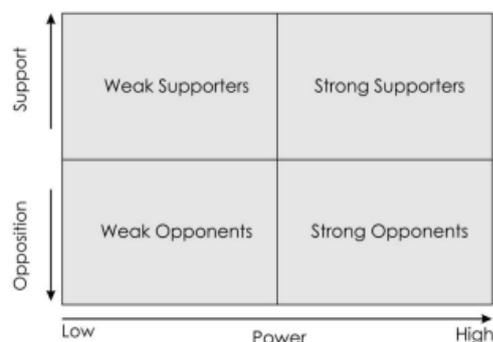
Sumber : Taufiq dan Vermonte (2015)

Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa beberapa *stakeholder* yang mempunyai fokus dan kepentingan terhadap suatu isu yang ditunjukkan oleh gambar panah. Walaupun secara spesifik setiap *stakeholder* memiliki kepentingan yang berbeda, hal tersebut dapat memunculkan kemungkinan terjadinya konflik antar *stakeholder*.

2. *Problem-Frame Stakeholder Map*

Merupakan teknik analisis pemetaan *stakeholders* yang digunakan dengan tujuan memahami definisi permasalahan atau isu sehingga teknik ini dapat membantu membangun koalisi pemenangan (*wining coalition*). Analisis menggunakan teknik ini diperlukan dalam merumuskan cara untuk mengartikan permasalahan yang dapat memberikan motivasi tindakan oleh koalisi *stakeholders* untuk melindungi para pemangku kepentingan selama proses implementasi kebijakan.

Gambar 1. 2
Problem-Frame Stakeholder Map



Sumber : Bryson (2011)

Dalam grid *problem-frame stakeholder map* ini, terdapat empat kelompok *stakeholder* berdasarkan jenis dukungan yaitu kelompok pendukung dan kelompok penentang, serta berdasarkan tingkat kekuasaan atau kewenangannya yaitu *stakeholder* yang mempunyai pengaruh atau kekuasaan yang kecil.

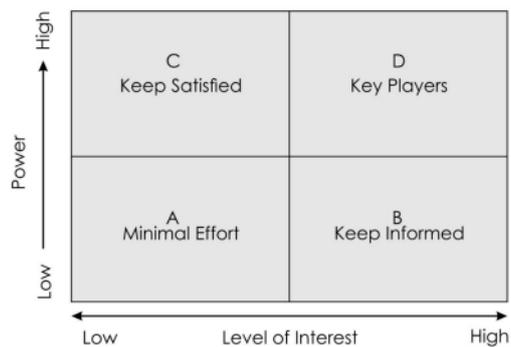
3. *Power Versus Interest Grid*

Stakeholders sering diidentifikasi dengan suatu dasar tertentu sebagaimana dikemukakan oleh Freeman, yaitu dari aspek kekuatan (*power*) dan kepentingan (*interest*) relatif *stakeholder* terhadap suatu isu. Peran *stakeholders* dapat dianalisis dengan menggunakan matriks peran *stakeholder*, dilanjutkan tahap berikutnya yaitu menentukan peta keterkaitan antara tingkat kekuatan dan kepentingan dari setiap *stakeholders*.

Matriks *power versus interest grid* digunakan untuk menentukan sejumlah kelompok kepentingan dan kelompok yang mempunyai kewenangan dalam suatu isu tertentu. Kuadran ini juga dapat menyoroti koalisi yang mungkin dapat dibentuk. Terdapat dua fokus utama dalam teknik analisis model ini yaitu kekuasaan (*power*) dan kepentingan (*interest*). Kekuasaan timbul dari potensi yang dimiliki *stakeholder* untuk memberikan pengaruh terhadap kebijakan atau organisasi yang berasal dari kekuasaan yang berbasis kedudukan atau sumber daya yang dimiliki dalam organisasi. Kekuasaan tersebut juga dapat berasal dari kredibilitas *stakeholder* sebagai pemimpin. Sedangkan kepentingan *stakeholders* dapat diukur melalui tingkat keaktifannya. Hal penting yang dilakukan dalam melakukan pemetaan kekuasaan dan kepentingan adalah

menentukan intervensi serta langkah-langkah yang perlu dilakukan terhadap *stakeholder* yang sudah dipetakan.

Gambar 1.3
Kuadran *Power versus Interest Grid*



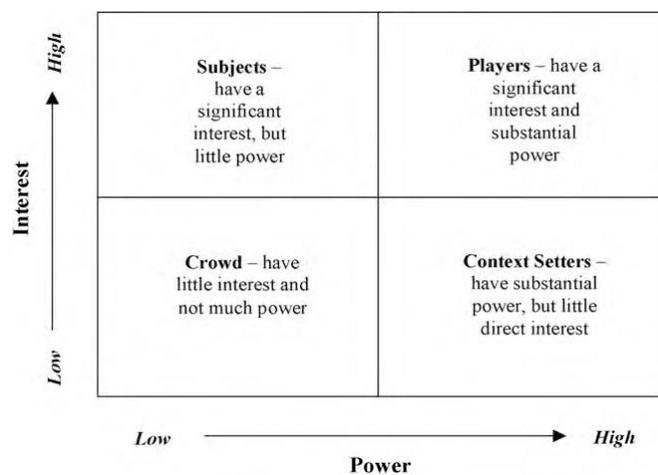
Sumber : Taufiq dan Vermote (2015)

Berdasarkan kuadran tersebut, kolom A menunjukkan *stakeholder* yang mempunyai *power* dan *interest* yang lemah. Pada kolom B menunjukkan *stakeholders* yang mempunyai *interest* yang kuat, namun tidak memiliki *power* yang besar. Kolom C menunjukkan *stakeholder* yang memiliki *power*, namun tidak mempunyai *interest* yang kuat. Sedangkan kolom D menunjukkan *stakeholders* yang memiliki *power* dan *interest* yang kuat dan besar. *Power* yang dalam hal ini yaitu kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan dan memberikan dampak yang besar. Sementara *interest* yaitu perhatian *stakeholders* terhadap suatu isu atau fokus yang dilandasi motivasi tertentu.

Selain itu, menurut Bryson dalam Hidayah et al (2019 : 58) peran *stakeholder* dapat dianalisis dimulai menyusun *stakeholder* pada matriks dua kali dua menurut minat (*interest*) *stakeholder* terhadap suatu masalah dan

kekuasaan (*power*) *stakeholder* dalam mempengaruhi masalah tersebut. Minat (*interest*) merupakan kepentingan *stakeholder* terhadap pembangunan. Sementara kekuasaan (*power*) *stakeholder* untuk mempengaruhi atau membuat kebijakan maupun peraturan-peraturan pembangunan.

Gambar 1. 4
Matriks Analisis Peran *Stakeholder*



Sumber : Hidayah (2019)

Matriks *power versus interest grids* menunjukkan posisi kepentingan *stakeholders* dalam organisasi dan kekuatan *stakeholders* untuk memberikan pengaruh terhadap organisasi dan kekuatan *stakeholders* untuk memberikan pengaruh terhadap organisasi pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. Matriks tersebut terdiri dari empat kategori pemangku kepentingan diantaranya :

1. *Context setter*, berpengaruh tinggi tetapi kepentingannya sedikit. Sehingga mereka dapat menjadi risiko yang signifikan yang harus dipantau.

2. *Players*, merupakan *stakeholder* yang aktif dikarenakan mereka berkepentingan dan berpengaruh tinggi terhadap pengembangan suatu proyek atau program.
3. *Subject*, mempunyai kepentingan yang tinggi namun berpengaruh rendah dan meskipun mereka mendukung kegiatan, dimungkinkan tidak ada kapasitas terhadap dampak. Akan tetapi mereka dapat menjadi pengaruh apabila membentuk aliansi dengan *stakeholder* lainnya.
4. *Crowd*, merupakan *stakeholder* yang sedikit berkepentingan dan berpengaruh terhadap hasil yang diinginkan. Ini menjadi pertimbangan untuk mengikutsertakannya dalam pengambilan keputusan. Pengaruh dan kepentingan akan berubah seiring berjalannya waktu, sehingga diperlukan untuk menjadi bahan pertimbangan.

Teknik *stakeholders mapping* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *power and interest grid* yang dikemukakan oleh Bryson, karena teknik ini selaras dengan penelitian yang dilakukan untuk menganalisis peran *stakeholders* dalam pengelolaan objek wisata Telaga Menjer Desa Maron.

1.5.2.6 Peran *Stakeholders*

Peran merupakan seperangkat hak dan kewajiban yang dilaksanakan oleh seseorang yang mempunyai status tertentu. Peran adalah aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu, yang apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan yang dimilikinya, maka ia melaksanakan suatu peran.

Robbins dan Hummels mengartikan peran sebagai satu set pola perilaku yang diharapkan dapat dihubungkan dengan seseorang yang berada pada posisi tertentu di kesatuan sosial. Menurut Soekanto, peran merupakan sebuah konsep mengenai apa yang dapat dilakukan individu yang krusial bagi struktur sosial masyarakat; peranan mencakup berbagai norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini adalah serangkaian beberapa peraturan yang memandu seseorang dalam kehidupan permasalahan (Adnyana & Mohktar, 2019 : 15).

Peran adalah perilaku yang dilakukan seseorang yang menempati kedudukan tertentu dalam status sosial. Terdapat tiga syarat peran, meliputi :

1. Peran mencakup berbagai norma yang dikaitkan dengan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Dalam artian peranan adalah serangkaian beberapa peraturan yang mengarahkan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peran merupakan konsep perilaku mengenai apa yang bisa dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran dapat juga diartikan sebagai perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
3. Peran merupakan rangkaian teratur yang muncul sebab suatu jabatan. Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup secara berkelompok (Susilo et al., 2018 : 249).

Teori peran merupakan kombinasi beberapa macam teori, orientasi dan disiplin ilmu. Peran dapat diartikan pada sebuah karakter yang dimiliki untuk dilakukan oleh seorang aktor pada sebuah pentas drama. Peran dalam konteks sosial berarti

suatu fungsi yang dilakukan oleh seseorang ketika menempati kedudukan tertentu dalam struktur sosial.

Biddle dan Thomas membagi lima prinsip mengenai perilaku yang berkaitan dengan peran, terdiri dari :

1. Harapan (*Expectation*)

Harapan orang lain mengenai perilaku yang pantas dan seharusnya ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu. Harapan ini dapat berlaku umum, namun juga dapat merupakan harapan dari segolongan orang, atau seorang tertentu.

2. Norma (*Norm*)

Norma adalah salah satu bentuk harapan yang bersifat normatif, yaitu keharusan yang menyertai suatu peran.

3. Wujud perilaku (*Performance*)

Peran diwujudkan melalui perilaku oleh aktor. Perilaku yang ditunjukkan oleh seorang aktor dengan aktor yang lain tentunya berbeda dan bervariasi. Perbedaan dan variasi ini yang dilihat normal dan tidak terbatas dalam teori peran.

4. Penilaian (*Evaluation*)

Dalam teori peran, penilaian peran merupakan kesan positif atau negatif yang diberikan oleh masyarakat sesuai norma yang berlaku terhadap suatu perilaku yang dilakukan oleh aktor.

5. Sanksi (*Sanction*)

Sanksi dalam teori peran merupakan upaya yang dilakukan oleh seorang aktor dalam menegakkan suatu nilai positif, atau upaya perwujudan peran diubah sedemikian rupa, sehingga dapat merubah hal negatif menjadi positif.

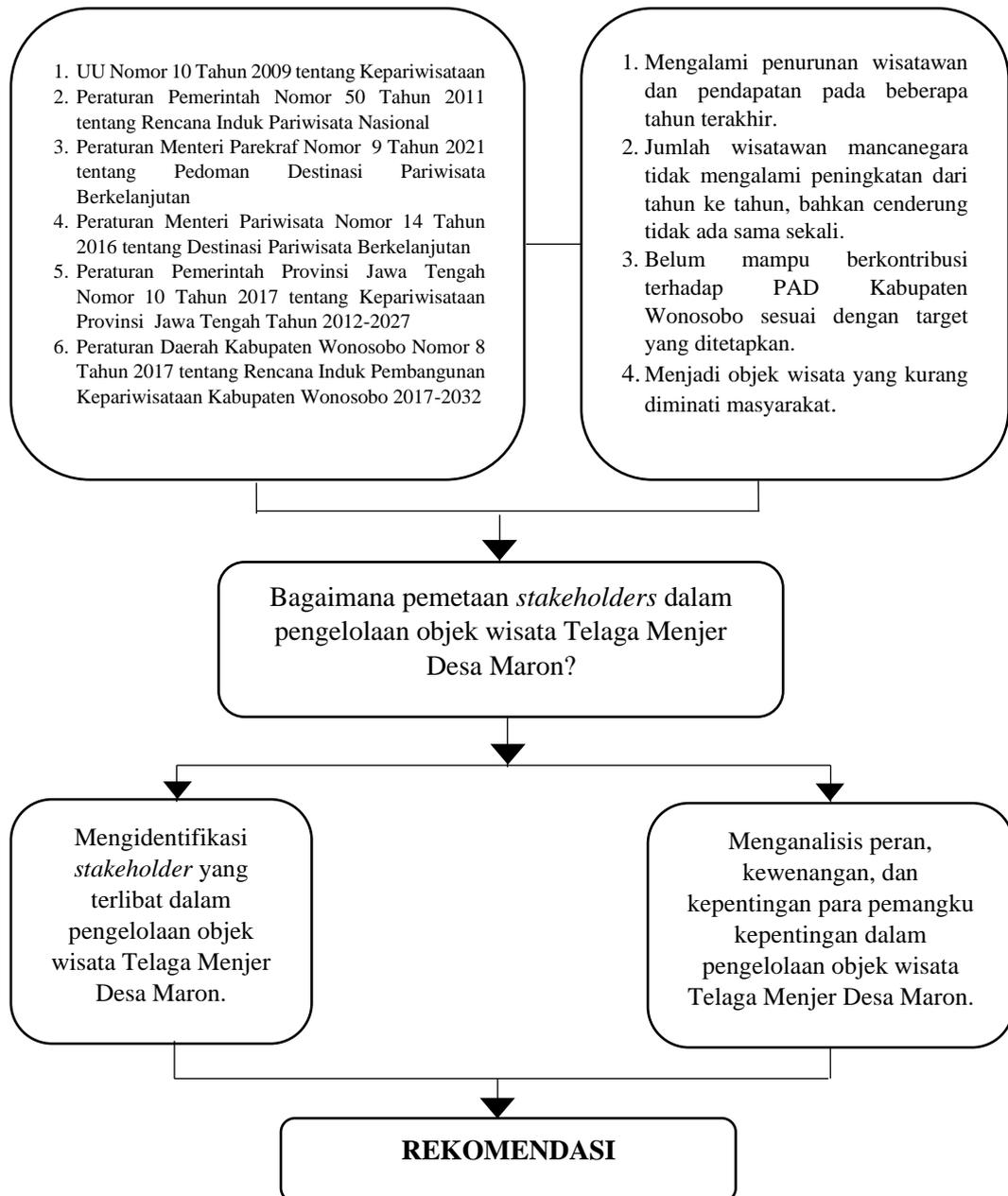
Menurut Nugroho (2014) dalam program pembangunan, berdasarkan peranannya, *stakeholders* dikelompokkan menjadi empat yaitu :

- a. *Policy creator*, yaitu *stakeholder* yang berperan sebagai pengambil keputusan dan penentu suatu kebijakan.
- b. Koordinator, yaitu *stakeholder* yang berperan mengkoordinasikan *stakeholder* lain yang terlibat.
- c. Implementor, yaitu *stakeholder* yang berperan melaksanakan kebijakan termasuk kelompok sasaran.
- d. Fasilitator, yaitu *stakeholder* sebagai fasilitator yang berperan memberikan fasilitas dan mencukupi kebutuhan kelompok sasaran.
- e. Akselerator, yaitu *stakeholder* yang berperan mempercepat dan memberikan kontribusi agar suatu program dapat berjalan sesuai sasaran atau bahkan lebih cepat waktu pencapaiannya.

Dalam penelitian ini, peran *stakeholders* yang terlibat dikelompokkan menjadi lima yaitu *policy creator*, koordinator, implementor, fasilitator, dan akselerator.

1.6 Kerangka Pikir Penelitian

Gambar 1.5
Kerangka Pikir Penelitian



1.7 Fenomena Penelitian

Sesuai kerangka pemikiran penelitian diatas, adapun fenomena yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu :

1. *Stakeholders mapping* atau pemetaan *stakeholder*, merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memetakan posisi, kewenangan dan kepentingan *stakeholders* yang terlibat dalam suatu persoalan tertentu. Penelitian ini memetakan *stakeholders* yang memiliki kepentingan dalam pengelolaan wisata Telaga Menjer Desa Maron Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo. Pemetaan *stakeholder* ini akan mengidentifikasi *stakeholder* primer, *stakeholder* sekunder atau pendukung, dan *stakeholder* kunci.

Untuk mengidentifikasi *stakeholder* yang terlibat, penelitian ini menggunakan matriks *power and interest grid* sebagai instrumen dalam melakukan analisis *stakeholders mapping*.

2. Peran *stakeholders*, merupakan hak dan kewajiban yang dilakukan oleh suatu pihak yang memiliki kedudukan tertentu. Penelitian ini menganalisis peran *stakeholder* untuk mengetahui efektivitas peran dari masing-masing *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan wisata Telaga Menjer Desa Maron Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo. Adapun peran yang dimaksud meliputi *policy creator*, koordinator, implementor, fasilitator, dan akselerator.

Tabel 1. 4
Fenomena Penelitian

No.	Fenomena	Sub Fenomena
1.	Pemetaan <i>stakeholders</i> dalam pengelolaan wisata Telaga Menjer	Identifikasi <i>stakeholders</i> - <i>Stakeholder</i> Primer - <i>Stakeholder</i> Sekunder atau Pendukung - <i>Stakeholder</i> Kunci
2.	Peran <i>stakeholders</i> yang terlibat dalam pengelolaan wisata Telaga Menjer Desa Maron	- <i>Policy Creator</i> - Koordinator - Fasilitator - Implementor - Akselerator

1.8 Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, agar mampu memahami secara mendalam terhadap objek penelitian. Penelitian kualitatif merupakan salah satu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dengan peneliti merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, keunikan, dan mengkonstruksi fenomena, serta menemukan hipotesis (Sugiyono, 2020 : 9).

1.8.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif, yang diharapkan setelah memahami dan mendalami secara menyeluruh dan utuh dari objek yang diteliti, dapat menjawab dan memecahkan permasalahan yang ada yaitu berkaitan dengan *stakeholders mapping* dalam pengelolaan objek wisata Telaga Menjer dan hasil pikir dengan menggunakan pengukuran dan menarik kesimpulan.

1.8.2 Situs Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Maron, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo tepatnya objek wisata Telaga Menjer, yang didasarkan pada judul penelitian yang diangkat yaitu *Stakeholders Mapping* Pengelolaan Wisata Telaga Menjer Desa Maron Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo. Hal ini dilandasi oleh ketertarikan peneliti mengenai pemetaan *stakeholder*. Telaga Menjer merupakan salah satu objek wisata di Kabupaten Wonosobo yang dalam pengelolaannya dilakukan melalui kolaborasi beberapa *stakeholder*. Ketertarikan ini juga berkaitan dengan adanya konflik-konflik yang terdapat dalam pelaksanaan pengelolaan yang menyebabkan menurunnya jumlah wisatawan baik wisatawan nusantara maupun mancanegara dan pendapatan dari objek wisata Telaga Menjer belum mampu berkontribusi terhadap PAD Kabupaten Wonosobo.

1.8.3 Subjek Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik *snowball* dalam menentukan narasumber untuk memperoleh informasi secara mendalam. Teknik *snowball* yaitu teknik penentuan narasumber secara bergulir yang bermula sedikit kemudian berkembang menjadi

lebih banyak sesuai dengan perkembangan pemenuhan informasi, seperti bola salju yang menggelinding secara terus-menerus. Narasumber awal dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa Maron, kemudian dilanjutkan kepada narasumber lain yang direkomendasikan sesuai dengan fokus penelitian ini.

1.8.4 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk kata verbal, seperti teks, kata-kata tertulis, frasa-frasa, atau simbol-simbol yang menggambarkan atau merepresentasikan orang-orang, tindakan-tindakan, dan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sosial. Data kualitatif dalam penelitian ini diantaranya gambaran umum objek penelitian, permasalahan yang terjadi, dan peran para *stakeholders*. Sedangkan data kuantitatif merupakan jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. Dalam penelitian ini yang termasuk data kuantitatif diantaranya jumlah wisatawan dan pendapatan Telaga Menjer dari tahun ke tahun.

1.8.5 Sumber Data

Untuk mendapatkan informasi mengenai praktik *stakeholders mapping* dalam pengelolaan wisata Telaga Menjer, peneliti menggunakan dua sumber data yaitu :

1. Data Primer

Data primer diperoleh dari narasumber yang dikumpulkan langsung dari lapangan yaitu melalui wawancara dan observasi. Untuk memperoleh data yang relevan, narasumber dipilih melalui purposive sampling dengan

pertimbangan narasumber adalah narasumber kunci, yang mengetahui dan terlibat dalam pengelolaan wisata Telaga Menjer.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari sumber lain sebagai pendukung data primer, yang didapatkan dari peraturan perundangan, petunjuk teknis, dokumen, booklet, atau dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan wisata Telaga Menjer serta berkaitan dengan penelitian sehingga dapat melengkapi data primer.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu usaha untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik yang saling mendukung, mempertajam analisis, dan triangulasi data. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu :

1. Wawancara

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara semi terstruktur. Bentuk wawancara dalam penelitian ini diberikan kebebasan untuk memberi jawaban atas pertanyaan terbuka. Selain itu wawancara bebas mengarah pada proses tanya jawab menuju pada permasalahannya, sehingga sesuai dengan sasaran yang dikehendaki.

2. Observasi

Teknik pengumpulan data selanjutnya yaitu observasi. Observasi merupakan tindakan mencatat fenomena di lapangan melalui panca indera terkait apa yang dilakukan dan dikatakan atau diperbincangkan para informan dalam aktivitas

kehidupan sehari-hari sebelum, menjelang, ketika, atau sesudahnya. Dalam penelitian ini rencana observasi dilakukan di Telaga Menjer untuk mengamati hasil kolaborasi yang telah dilaksanakan dalam pengelolaan Telaga Menjer secara umum dan secara khusus.

3. Dokumentasi

Disamping melakukan wawancara dan observasi, peneliti juga melihat, membaca, mengecek, dan memahami berbagai dokumen yang relevan dengan penelitian. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumen yang dimaksud seperti peraturan yang sudah ada, surat keputusan, surat perjanjian kerjasama, notulensi rapat saat melakukan kolaborasi, dan berbagai dokumen lain yang relevan.

1.8.7 Analisis Interpretasi Data

Analisis data menurut Sugiyono (2020 : 131) merupakan proses pencarian dan penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan mengorganisasikan data ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan menarik kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data kualitatif bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Adapun aktivitas dalam analisis data menurut Miles and Huberman (1984) yaitu :

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pada tahap awal, peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap objek yang diteliti. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi.

2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih, dan memilih beberapa hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh teori dan tujuan yang akan dicapai. Dengan demikian data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya apabila diperlukan.

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Mendisplay data dilakukan setelah data direduksi. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, diagram alir, dan sejenisnya. Penyajian data dalam penelitian kualitatif lebih sering dijumpai dalam bentuk teks bersifat naratif. Mendisplay data dilakukan untuk memudahkan memahami apa yang terjadi dan merencanakan pekerjaan selanjutnya sesuai dengan apa yang telah dipahami.

4. *Concluding Drawing/Verification*

Menurut Miles and Huberman (1984) langkah keempat dalam analisis data kualitatif yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam hal ini masih bersifat sementara, dan dapat berubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Namun apabila kesimpulan tersebut didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, namun terdapat kemungkinan tidak dapat menjawab rumusan masalah tersebut, karena seperti yang telah dikemukakan, masalah dan rumusan masalah pada penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang bahkan berubah setelah penelitian berada di lapangan.

Pengumpulan data yang sistematis dapat membantu penulis dalam menyusun laporan penelitian agar lebih tertata. Dengan begitu, penulis dapat melakukan metode dalam pengumpulan data, memulainya dengan merangkum hal-hal pokok, menarasikan, dan menarik kesimpulan.

1.8.8 Kualitas Data

Kredibilitas dalam penelitian kualitatif, yaitu keberhasilan mencapai maksud mengeksplorasi masalah atau kepercayaan terhadap hasil penelitian. Pengujian kredibilitas pada penelitian kualitatif, salah satunya dapat dilakukan melalui triangulasi data. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Menurut Sugiyono (2020 : 189) terdapat tiga macam teknik triangulasi, yaitu :

1. Triangulasi Sumber, dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
2. Triangulasi Teknik, dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
3. Triangulasi Waktu, merupakan pengujian kredibilitas data yang dilakukan dengan melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

Dalam penelitian ini terdapat dua teknik triangulasi yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Peneliti melakukan dengan menanyakan pertanyaan yang sama kepada narasumber penelitian dan dari jawaban narasumber dianalisis untuk mengkonfirmasi apakah jawabannya selaras atau berbeda. Kemudian untuk triangulasi teknik, pengumpulan data dilakukan dengan cara mengecek sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Triangulasi dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian membandingkan data hasil wawancara dengan isi dokumen terkait.